



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNI SANDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA
3. NHK : 139796

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.692.138.069

1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/128 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/177 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
3. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 52.741.395
4. Tanah Seluas 301 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 226.787.998
5. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 187.608.676

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 169.800.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.800.000
2. MOBIL, HONDA BR-V MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 82.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 27.165.808

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.074.601.515

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.045.705.392

III. HUTANG Rp. 291.496.474

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.754.208.918



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.